

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas terhadap kinerja-kinerja serta fungsi dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat serta pertanggung jawabannya ke Publik dapat disimpulkan bahwa DPR sendiri memiliki fungsi yaitu *Legislasi*, *Pengawasan* serta *Anggaran* dan ketiga fungsi tersebut masih banyak catatan dari masyarakat terhadap kinerja DPR. Pertanggung jawaban publik DPR selama ini diduga menempatkan DPR sebagai Lembaga Negara yang tidak dapat dipercaya dari segi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Setiap periode kinerja DPR pasca Reformasi dapat disimpulkan tidak ada ada perkembangan yang mengarah kemajuan terhadap lembaga wakil rakyat ini. Dari fungsi Legislasi, DPR selama Reformasi belum pernah sekalipun menuntaskan kinerjanya di bidang ini. Bahkan diperiode 2014-2019 kinerja DPR dari segi legislasi hanya 14% yang terealisasikan menjadi Undang-Undang dari apa yang menjadi target Prolegnas. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan menjadi bagian yang tidak baik bagi publik dalam dalam hal pendidikan politik bagi publik dan contoh yang buruk. Sedangkan dari Fungsi Anggaran, meskipun APBN setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti oleh peran DPR sendiri dalam merumuskan APBN. Terlalu dominannya peran pemerintah dalam menyusun APBN memperlihatkan kurang maksimalnya peran DPR dalam menjalankan Fungsinya ini. Dan dari Fungsi Pengawasan juga tidak jauh beda dengan fungsi-fungsi yang lainnya, karena seolah-olah fungsi pengawasan ini

menghilang di dalam tubuh DPR sendiri karena Selama reformasi hanya pihak yang menjadi oposisi Pemerintah saja yang selalu mengusulkan untuk menggunakan fungsi ini tetapi fungsi ini selalu berhenti ditengah jalan dan tidak ada tindak lanjut ketika fungsi ini sudah dijalankan. Lemahnya sistem bagi Lembaga DPR sendiri secara tidak langsung menjadikan anggota DPR itu sendiri menjadi menurun kinerja bahkan cenderung tidak telalu serius dalam bekerja.

## **B. Saran**

Seharusnya DPR melakukan modernisasi lembaga dalam hal publikasi kepada Publik, seperti media sosial, karena di zaman sekarang media sosial dianggap salah satu alternatif yang konkrit dalam hal meningkatkan kinerja DPR karena terdapat ruang untuk mensosialisasikan kinerja DPR dan memberikan masukan serta saran kepada lembaga DPR dengan melibatkan partisipasi publik sehingga ada keterbukaan terkait kinerja DPR.